

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak secara global pada tahun 2020 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata Thailand. Penutupan perbatasan internasional dan pembatasan mobilitas lintas negara menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan mancanegara, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan nasional. Pada periode 2020–2021, sektor pariwisata Thailand mengalami kontraksi terdalam dalam sejarah modern, ditandai dengan anjloknya devisa pariwisata, terhentinya aktivitas industri perhotelan dan jasa, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi Thailand terhadap sektor pariwisata dan menempatkan pandemi sebagai krisis multidimensional yang harus ditangani melalui kebijakan nasional yang komprehensif.

Memasuki fase pemulihan, pemerintah Thailand mulai menerapkan berbagai kebijakan pembukaan kembali pariwisata secara bertahap. Program seperti Phuket Sandbox Scheme, Test & Go, serta pelonggaran kebijakan masuk bagi wisatawan internasional menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan pasar global. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan visa yang lebih fleksibel, seperti bebas visa bagi puluhan negara dan Long-Term Resident (LTR) Visa, yang bertujuan menarik wisatawan dengan durasi tinggal lebih lama dan kontribusi ekonomi yang lebih stabil. Strategi ini menunjukkan bahwa pemulihan pariwisata Thailand tidak hanya difokuskan pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kualitas sektor pariwisata dalam jangka menengah.

Dalam periode 2020–2025, strategi pemulihan pariwisata Thailand kemudian berkembang dengan mengintegrasikan nilai inklusivitas ke dalam kebijakan nasional. Melalui peran Tourism Authority of Thailand (TAT), pemerintah menjadikan pariwisata ramah LGBTQ+ sebagai salah satu segmen pasar prioritas dalam promosi pariwisata internasional. Kampanye *Go Thai. Be Free.*, partisipasi aktif dalam berbagai ajang Pride internasional, serta promosi destinasi yang aman dan terbuka menjadi bagian dari upaya membangun kembali citra Thailand sebagai destinasi wisata yang inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan tren global pariwisata yang semakin menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan penerimaan sosial bagi wisatawan.

Penguatan kebijakan pariwisata inklusif tersebut juga didukung oleh perubahan kebijakan domestik yang signifikan. Pengesahan Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis yang mulai berlaku pada tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat citra Thailand sebagai negara yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan. Keselarasan antara kebijakan pariwisata, diplomasi publik, dan regulasi nasional menciptakan konsistensi antara citra internasional yang dipromosikan dengan kebijakan domestik yang dijalankan. Secara keseluruhan, periode 2020–2025 menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata Thailand tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah untuk memperkuat posisi Thailand sebagai destinasi wisata global yang kompetitif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peningkatan pariwisata Thailand pada periode 2020–2025 tidak dapat dilepaskan dari konsistensi promosi pariwisata ramah LGBTQ+ yang dijalankan pemerintah. Integrasi kampanye internasional, promosi digital, serta dukungan kebijakan domestik menunjukkan bahwa pariwisata ramah LGBTQ+ diposisikan sebagai bagian dari strategi nasional dalam menarik kembali wisatawan internasional dan memperkuat daya saing pariwisata Thailand di tingkat global.

Dari hasil analisis promosi pariwisata ramah LGBTQ+ Thailand pada periode 2020–2025, penulis menemukan sejumlah poin penting yang relevan untuk dikemukakan dalam simpulan ini. Yang pertama adalah bahwa promosi pariwisata ramah LGBTQ+ Thailand secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata internasional. Keberlanjutan kampanye *Go Thai. Be Free.* menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak bersifat sementara, melainkan dirancang sebagai strategi jangka menengah dan panjang dalam pemasaran pariwisata Thailand.

Yang kedua, penulis melihat bahwa kemampuan adaptasi promosi pariwisata ramah LGBTQ+ Thailand terhadap perubahan situasi global, khususnya pada masa pandemi COVID-19, berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata. Di tengah keterbatasan mobilitas internasional, promosi pariwisata tetap dijalankan melalui pemanfaatan platform digital dan budaya populer, sehingga visibilitas Thailand sebagai destinasi wisata tetap terjaga hingga memasuki periode pemulihan.

Yang ketiga, penulis berpendapat bahwa dukungan kebijakan domestik memperkuat efektivitas promosi pariwisata ramah LGBTQ+ Thailand. Pengesahan Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis pada tahun 2025 memberikan legitimasi terhadap citra inklusivitas yang dipromosikan secara internasional dan meningkatkan kepercayaan wisatawan asing. Keselarasan antara kebijakan pariwisata dan regulasi nasional tersebut berkontribusi pada peningkatan pariwisata Thailand secara berkelanjutan.

Pemulihan dan peningkatan sektor pariwisata Thailand pada periode pascapandemi COVID-19 berlangsung melalui berbagai kebijakan yang saling melengkapi. Di antara kebijakan tersebut, pengembangan pariwisata yang mengedepankan nilai inklusivitas, termasuk pariwisata ramah LGBTQ+, memberikan kontribusi yang relevan dalam memperkuat daya tarik Thailand di pasar internasional. Meskipun kebijakan ini tidak berdiri sebagai faktor utama yang secara langsung menentukan peningkatan jumlah wisatawan maupun

pendapatan pariwisata negara, keberadaannya berperan penting dalam mendukung strategi pariwisata nasional secara keseluruhan. Dengan memperluas segmentasi pasar dan menyesuaikan diri dengan nilai global yang berkembang, promosi pariwisata ramah LGBTQ+ turut memperkaya citra Thailand sebagai destinasi wisata yang terbuka dan kompetitif, sehingga menjadi salah satu fondasi pendukung bagi keberlanjutan dan daya saing pariwisata Thailand ke depan.

## **6.2 SARAN**

### **6.2.1 Saran Teoritis**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep diplomasi publik dan hubungannya dengan sektor pariwisata, dengan menekankan pada promosi pariwisata yang mengedepankan keterbukaan dan penerimaan terhadap keberagaman. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan studi komparatif mengenai promosi pariwisata ramah LGBTQ+ di Thailand dengan negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di tingkat global, guna melihat perbedaan pendekatan kebijakan serta dampaknya terhadap peningkatan pariwisata.

### **6.2.2 Saran Praktis**

Bagi pemerintah Thailand, disarankan untuk terus menjaga konsistensi kebijakan pariwisata yang mengedepankan keterbukaan dan keamanan bagi seluruh wisatawan, serta memastikan bahwa pariwisata ramah LGBTQ+ tetap menjadi bagian dari strategi pariwisata nasional jangka panjang. Bagi pelaku industri pariwisata di Thailand, disarankan untuk meningkatkan peran dan komitmen dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, nyaman, dan terbuka bagi wisatawan, sehingga kepercayaan wisatawan internasional terhadap Thailand sebagai destinasi pariwisata dapat terus terjaga.